

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka akan menjelaskan beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan, baik berupa skripsi, tesis, jurnal ilmiah dan penelitian lainnya. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan beberapa tinjauan pustaka untuk memperjelas dan memperlengkap bahan penelitian yang telah disiapkan sebelumnya. Sehingga judul yang diajukan semakin menarik untuk dipahami dan ditelaah lebih jauh. Tindakan selanjutnya yang akan dilakukan penulis yakni mengkaji serta menguraikan beberapa jurnal ilmiah sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun tinjauan pustaka tersebut sebagai berikut:

Pertama, jurnal ilmiah yang berjudul *Kebijakan Pemerintah Filipina dalam Menangani Ancaman Gerakan Moro Islamic Liberation Front* oleh Anur Rafiq MS. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Filipina dalam menyelesaikan konflik dengan MILF. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dan teori *problem solving* dengan metode kualitatif. Dari penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa Filipina menggunakan metode *hard approach* dan *soft approach* dalam menyelesaikan masalah tersebut. Namun, metode pendekatan lunak lebih sering digunakan dalam hal negosiasi dan mediasi. Ini membuktikan Filipina telah menerapkan nilai demokrasi untuk menangani masalah tersebut. Perbedaannya dengan penelitian ini ialah bagaimana jurnal ini berbeda dengan penelitian yang tidak begitu kongkrit, dari jurnal ini banyak yang sama dengan penelitian tersebut.¹

¹ Anur Rafiq MS. *Kebijakan Pemerintah Filipina dalam Menangani Ancaman Gerakan Moro Islamic Liberation Front*. Journal of International Relations, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2017, hal. 66-73.

Kedua, jurnal ilmiah yang berjudul *Dinamika Gerakan Pembebasan Muslim Moro di Filipina Selatan: Studi Terhadap Moro National Liberation Front (1971-1996)* oleh Firmanzah. Muslim Filipina harus berjuang dari penindasan pemerintah Filipina dan melawan kelompok-kelompok Kristen yang lebih diakui pemerintah Filipina. Beberapa tahun setelah kemerdekaan Republik Filipina, masyarakat Muslim Moro menjalani hidup penuh kemiskinan, penuh diskriminasi dan tidak diperhatikan pemerintah Filipina. Muslim Moro di Filipina Selatan merasakan pemerintah Filipina yang berpusat di Manila melakukan penindasan dan kezaliman kepada mereka. Karena tujuan pemerintah bertujuan untuk pemerataan tanah Muslim di Filipina Selatan demi kepentingan ekonomi dan politik.²

Perbedaan penelitian dengan jurnal ini ialah jurnal ini mencakup ekonomi dan geografi dengan luas pembahasannya sedangkan penelitian ini membahas undang undang yang mencakup bangsa Moro tetapi di dalam pembahasan terdapat beberapa sedikit masalah ekonomi bangsa Moro sesudah kemerdekaan.

Ketiga, jurnal ilmiah yang berjudul *Asean Mechanism for Human Security Problems in Southeast Asia: What's Wrong* oleh Natalia Yeti Puspita. Dalam konsep ini, ancaman terhadap keamanan ditujukan langsung kepada manusia seperti bencana alam, wabah penyakit, narkoba dan perdagangan manusia, serta terorisme. Keamanan manusia (*human security*) adalah paradigma yang muncul untuk kerentanan manusia global yang para pendukungnya menolak atau menentang gagasan tradisional tentang keamanan nasional melalui keamanan militernya. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian tersebut ialah bahwa kasus terorisme di penelitian ini mencakup sebuah terorisme dengan perbedaan pendapat.³

Keempat, buku yang berjudul *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* oleh Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si. dan Dr. Yudi Rusfiana, M.Si. Dalam konsep

² Firmanzah. *Dinamika Gerakan Pembebasan Muslim Moro di Filipina Selatan: Studi Terhadap Moro National Liberation Front (1971-1996)*. Intelektualita: Volume 06, Nomor 01, 2017

³ Natalia Yeti Puspita. *Asean Mechanism for Human Security Problems in Southeast Asia: What's Wrong*. Vol. 19 Issue 2, Mei 2019

ini, dimaksudkan dalam satu aspek teori yang berusaha memberikan pengertian-pengertian dasar atau definisi-definisi rinci dari setiap kata atau kalimat yang digunakan dalam telaah ilmiah. Aspek teori yang lainnya adalah : generalisasi, proposisi dan hipotesa, tipe dan tingkatan, pendekatan, model dan paradigma. ⁴

2.2. Landasan Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Resolusi Konflik dan Keamanan Nasional (*National Security*). Teori tersebut akan di kaji bagaimana suatu Resolusi Konflik, Kepentingan Nasional, dan Keamanan nasional pemerintahan Negara Filipina terhadap Undang Undang Otonomi Daerah Bangsa Moro Tahun 2019.

2.3. Teori Resolusi Konflik

‘Konflik’, yang berasal dari kata latin *configere*, memiliki makna dua orang atau kelompok bisa lebih saling serang, saling menyakiti, bahkan bisa saling menghabisi pihak lawannya. Peta konflik terutama yang disertai kekerasan dalam periodisasi terakhir seperti disebut diatas, menampilkan profil yang sangat mengusik ketentraman kehidupan umat manusia. Laporan yang dibuat sebuah tim dari *Center for International Development and Conflicts Management* di Universitas Marryland melaporkan bahwa terjadi peningkatan jumlah yang sangat signifikan dari konflik dengan kekerasan dari sejak 1950-an sampai 1980-an. Catatan pentingnya disini adalah dunia pada masa ini dinodai oleh konflik internal yang jumlahnya mencapai tiga kali lipat jumlah konflik antar negara yang terjadi dalam kurun waktu setengah abad terakhir. Melalui penelusuran dari studi terdahulu mengenai beragam konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, serta berdasarkan kerangka konseptual dan teoritis mengenai konsep dan teori resolusi

⁴ Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si. dan Dr. Yudi Rusfiana, M.Si. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 75.

konflik yang banyak dikembangkan dalam dunia akademis, maka tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika kita dihadapan dengan situasi konflik maka kita harus mulai memikirkan apa yang dalam pemaparan berikutnya dikenal sebagai “Resolusi Konflik”(Tidwell, 1998).⁵

Konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan dari kehidupan manusia. Juga menambahkan bahwa konflik merupakan fakta kehidupan, maka tidak mungkin kita bisa menghindarinya. Konflik bisa terjadi pada siapapun dan dimanapun mengemukakan bahwa

“The most common and visible type conflict in schools as well as other organizations is interpersonal conflict”,

Artinya konflik yang sering terjadi di sekolah maupun organisasi lainnya adalah konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah konflik yang terjadi dalam hubungan interpersonal dimana tindakan atau tujuan seseorang terganggu, terhambat atau terhalangi orang lain karena adanya pertentangan kepentingan atau kebutuhan.⁶

2.4. Teori Keamanan Nasional (National Security)

The Committee on the Administration of Justice (CAJ) mengeluarkan sebuah laporan di akhir 2012 yang berjudul *“The Policing You Don’t See”*. Laporan ini mengaris bawahi ‘*parallel justice system*’ yang saat ini beroperasi di Irlandia Utara. Ini terdiri dari kekuatan polisi yang akuntabel kepada mekanisme lokal dan hal lainnya dari ‘kekuatan diluar kekuatan’ yang bertanggung jawab kepada isu keamanan nasional yang beroperasi didalam *Security Service (MI5)* London(Belfast: 2012). Keamanan nasional sebagai suatu konsepsi yang dikeluarkan AS pada saat Perang Dingin memiliki asosiasi yang sangat erat

⁵ I Nyoman Sudira. *Resolusi Konflik dalam Perubahan Dunia*. Global: Jurnal Politik Internasional. Vol. 19. Nomor 2. Tahun 12 Desember 2017.

⁶ Arfiani Yulia Aminati. *STUDI KEPUSTAKAAN MENGENAI LANDASAN TEORI DAN PRAKTIK KONSELING RESOLUSI KONFLIK INTERPERSONAL*. Volume 03 Nomor 01 Tahun 2013.

dengan pendekatan militer sebagai suatu pendekatan tradisional. Sementara berakhirnya Perang Dingin, perubahan cukup signifikan terjadi terutama dalam hubungannya dengan perang melawan terorisme.⁷

Keamanan nasional sebagai suatu konsep terjadi perubahan seiring dengan konstelasi politik internasional. Mendefinisikannya menjadi sesuatu hal yang tidak mudah. Dalam kerangka hukum internasional, keamanan nasional sebagai suatu konsep diserahkan kepada masing-masing negara asal tidak menyalahi konsepsi Negara demokratis. Perubahan dari Perang Dunia II ke Perang Dingin dan berakhirnya Perang Dingin menyebabkan terjadinya perubahan terhadap konsepsi mengenai keamanan itu sendiri. Terkait hal tersebut maka tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana perubahan atas konsepsi keamanan itu terjadi, apa saja yang diangkat dalam perubahan tersebut, bagaimana dampak terhadap pendefinisian konsep keamanan nasional, serta bagaimana hukum internasional yaitu terutama hak asasi manusia melihat hal ini. Hal-hal baru yang semakin meningkat dan menguat mempengaruhi konsepsi mengenai keamanan nasional. Isu-isu tersebut antara lain adalah hak asasi manusia, globalisasi dan teknologi, dan terorisme. Akibat dari hal ini adalah konsep mengenai keamanan nasional menjadi meluas. Setelah Perang Dingin, resiko keamanan seperti kejahatan terorganisir, pelucutan nuklir dan terorisme bergerak menjadi pusat pembicaraan didalam keamanan nasional dan internasional. Sejalan dengan praktik keamanan yang berubah, para peneliti melihatnya menjadi lebih luas. Banyak perhatian ditujukan kepada internasionalisasi dan militerisasi polisi. Dalam hubungannya dengan hak asasi manusia dan pembangunan manusia, maka konsep keamanan muncul pandangan mengenai kemanan manusia. Gagasan ‘keamanan manusia’ juga telah menambahkan dimensi baru untuk perluasan konsep keamanan, karena Program Pembangunan PBB (UNDP) yang menjadi wacana kebijakan pada tahun 1994 dalam laporan keamanan Pembangunan Manusia. Manusia telah kemudian memberikan landasan teoritis untuk pengembangan ‘tanggung jawab untuk

⁷ Indah Amaritasari. *Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standar Internasional*. JURNAL KEAMANAN NASIONAL. Vol. I No. 2 2015

melindungi' konsep (*responsibility to protect*) sebagai agenda kebijakan yang secara resmi disahkan di tahun 2005 *World Summit Outcome*.⁸

⁸ Ibid